

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

##### 6.1.1 Analisis Deskriptif

##### 6.1.1.1 Disparitas Tax Ratio Antar Kota Wilayah Sumatera-Jawa

Kesimpulan dari Disparitas Tax Ratio antar Kota adalah sebagai berikut :

1. Daerah Kota yang memiliki Tax Ratio yang Tinggi mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, dimana terjadi penurunan jumlah kota dari 26 kota menjadi 18 kota. Terjadinya penurunan jumlah kota yang memiliki Tax Ratio Tinggi tersebut disebabkan oleh besarnya penurunan jumlah kota yang berTax Ratio Tinggi di kota pada Wilayah Sumatera dari 14 kota menjadi 6 kota.
2. Tax Ratio Normal mengalami Kenaikan dari tahun 2010-2014, dimana terjadi kenaikan jumlah kota dari 22 kota menjadi 25 kota. Terjadinya kenaikan jumlah kota yang memiliki Tax Ratio Normal tersebut disebabkan oleh besarnya kenaikan jumlah kota yang berTax Ratio Normal pada tahun 2010-2014 di kota pada Wilayah Sumatera dari 11 kota menjadi 14 kota.
3. Tax Ratio Rendah mengalami Kenaikan dari tahun 2010-2014, dimana terjadi kenaikan jumlah kota dari 7 kota menjadi 13 kota. Terjadinya kenaikan jumlah kota yang memiliki Tax Ratio Normal tersebut disebabkan oleh besarnya kenaikan jumlah kota yang berTax Ratio Rendah pada tahun 2010-2014 di kota pada Wilayah Sumatera dari 6 kota menjadi 11 kota.

4. Status Tax Ratio Sangat Rendah mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, dimana terjadi penurunan jumlah kota dari 1 kota menjadi tidak ada lagi. Terjadinya kenaikan jumlah kota yang memiliki Tax Ratio Normal tersebut disebabkan oleh turunnya jumlah kabupaten yang berTax Ratio Rendah pada tahun 2010-2014 di kota pada Wilayah Jawa dari 1 kota menjadi 0.

#### **6.1.1.2 Disparitas Tax Ratioa Antar Kabupaten Wilayah Sumatera-Jawa**

Kesimpulan dari Disparitas Tax Ratio antar Kabupaten Wilayah Sumatera-Jawa adalah sebagai berikut :

1. Daerah Kabupaten yang memiliki Tax Ratio yang Tinggi mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, penurunan jumlah terjadi dari 12 menjadi 6 kabupaten. Terjadinya penurunan jumlah kabupaten yang memiliki Tax Ratio Tinggi tersebut disebabkan oleh besarnya penurunan jumlah kabupaten yang berTax Ratio Tinggi di kabupaten pada Wilayah Sumatera dari 9 menjadi 2 kabupaten.
2. Status Tax Ratio Normal mengalami kenaikan dari tahun 2010-2014, dimana terjadi kenaikan jumlah kabupaten dari 33 menjadi 34 kabupaten. Terjadinya kenaikan jumlah kabupaten yang memiliki Tax Ratio Normal tersebut disebabkan oleh besarnya kenaikan jumlah kabupaten yang berTax Ratio Normal pada tahun 2010-2014 pada Wilayah Jawa, dari 17 menjadi 24 kabupaten
3. Status Tax Ratio Rendah mengalami Kenaikan dari tahun 2010-2014, terjadi karena naiknya jumlah kabupaten yang status Tax Rationya Rendah. Yaitu dari

121 menjadi 145 kabupaten. Penyebabnya karena besarnya kenaikan jumlah kabupaten yang berTax Ratio Rendah pada tahun 2010-2014 di pada Wilayah Sumatera dari 62 menjadi 93 kabupaten.

4. Daerah Kabupaten yang memiliki Tax Ratio yang Sangat Rendah mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, terjadi karena menurunnya jumlah kabupaten yang Sangat Rendah Tax Rationya dari 19 menjadi 3 kabupaten. Penurunan jumlah kabupaten yang memiliki Tax Ratio Sangat Rendah tersebut, terjadinya disebabkan oleh besarnya penurunan jumlah kabupaten yang berTax Ratio Sanagat Rendah di kabupaten pada Wilayah Sumatera dari 19 menjadi 3 kabupaten.

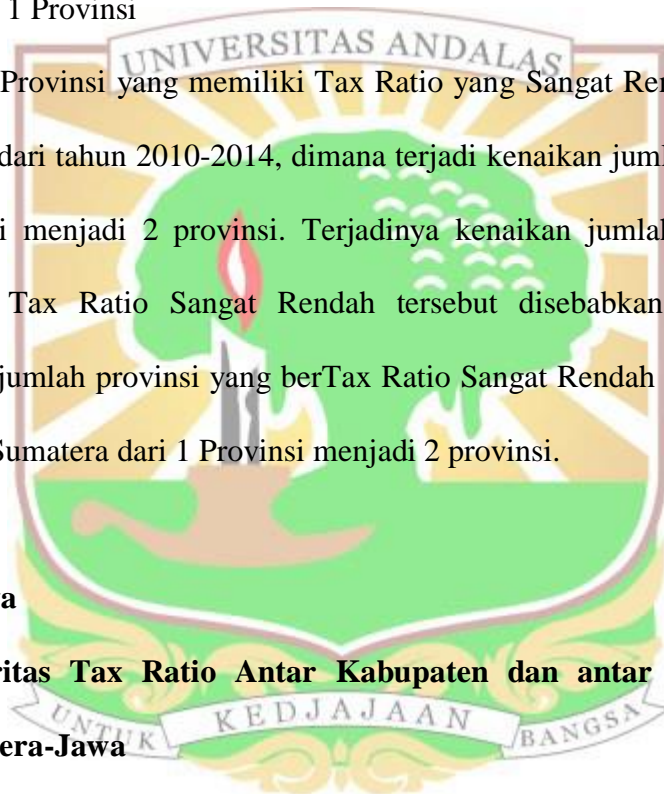
#### **6.1.1.3 Disparitas Tax Ratio Antar Provinsi Wilayah Sumatera-Jawa**

Kesimpulan dari Disparitas Tax Ratio antar Kota Wilayah Sumatera-Jawa adalah sebagai berikut :

1. Provinsi yang memiliki Tax Ratio yang Tinggi mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, dimana terjadi penurunan jumlah provinsi dari 2 menjadi 1 provinsi. Terjadinya penurunan jumlah provinsi yang memiliki Tax Ratio Tinggi tersebut disebabkan oleh besarnya penurunan jumlah provinsi yang berTax Ratio Tinggi pada Wilayah Sumatera dari 1 kota menjadi 0.
2. Provinsi yang berTax Ratio Normal mengalami kenaikan dari tahun 2010-2014, dimana terjadi kenaikan jumlah provinsi dari 4 menjadi 6 provinsi. Terjadinya kenaikan jumlah provinsi yang memiliki Tax Ratio Normal tersebut disebabkan oleh besarnya kenaikan jumlah provinsi yang berTax Ratio Normal

pada tahun 2010-2014 pada Wilayah Jawa dari 1 menjadi 2 provinsi dan pada Wilayah Sumatera dari 3 menjadi 4 propinsi.

3. Wilayah Provinsi yang berTax Ratio Rendah mengalami penurunan dari tahun 2010-2014, dari 5 menjadi 3 provinsi. Penurunan Jumlah tersebut disebabkan oleh turunnya jumlah provinsi yang berTax Ratio Rendah pada tahun 2010-2014 pada Wilayah Sumatera dari 3 menjadi 2 provinsi, dan Wilayah Jawa dari 2 menjadi 1 Provinsi
4. Wilayah Provinsi yang memiliki Tax Ratio yang Sangat Rendah mengalami kenaikan dari tahun 2010-2014, dimana terjadi kenaikan jumlah provinsi dari 1 provinsi menjadi 2 provinsi. Terjadinya kenaikan jumlah provinsi yang memiliki Tax Ratio Sangat Rendah tersebut disebabkan oleh besarnya kenaikan jumlah provinsi yang berTax Ratio Sangat Rendah di provinsi pada Wilayah Sumatera dari 1 Provinsi menjadi 2 provinsi.



## **6.1.2 Anova**

### **6.1.2.1 Disparitas Tax Ratio Antar Kabupaten dan antar Kota Wilayah Sumatera-Jawa**

Hasil Anova Tax Ratio kabupaten dan antar kota terdapat keragaman dalam bentuk perbedaan rata-rata di setiap tahun atas Tax Ratio di Wilayah Sumatera 1 yang terdiri dari kabupaten/kota pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Provinsi Riau, Sumatera 2 yang terdiri dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Provinsi Lampung dan Jawa yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Provinsi Jawa Timur.

### 6.1.2.2 Disparitas Tax Ratio Antar Provinsi Wilayah Sumatera-Jawa

Hasil Anova Tax Ratio Provinsi tidak ada keragaman atau perbedaan rata-rata disetiap tahun atas Tax Ratio di Wilayah Sumatera 1, Sumatera 2 dan Jawa.

### 6.2 Saran

Pemda perlu menghentikan kecenderungan naiknya jumlah kota/Kabupaten serta provinsi yang berTax Ratio Rendah serta turunnya jumlah jumlah kota/Kabupaten serta provinsi yang berTax Ratio Normal dan Tinggi terutama di Wilayah Sumatera dengan melakukan

1. Membuat program dan kegiatan yang akan mengatasi naiknya jumlah kota/Kabupaten serta provinsi yang berTax Ratio Rendah serta turunnya jumlah jumlah kota/Kabupaten serta provinsi yang berTax Ratio Normal dan Tinggi
2. Melakukan upaya intensifikasi pajak daerah pada kota/Kabupaten serta provinsi yang berTax Ratio Rendah
3. Semua hal diatas dilakukan berdasarkan kajian penggalan potensi perpajakan agar pajak daerah yang dipungut betul-betul berdasarkan realitas potensi yang ada.

Penelitian ini masih memasukkan unsur migas didalam data PDRB Kabupaten/Kota dan Propinsi, dikarenakan BPS ditahun 2010-2014 belum memisahkan unsur pendapatan migas, sehingga berakibat menghasilkan bias dalam proses perhitungannya. Diharapkan penelitian yang akan menduplikasi penelitian jenis ini agar mengeluarkan pendapatan migas dalam proses metodologi penghitungannya.